

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Israel merupakan sebuah negara yang terletak di wilayah Timur Tengah dengan mayoritas penduduknya merupakan kelompok etnik Yahudi. Kemerdekaan Israel di tahun 1948 mendapatkan banyak kecaman dari negara-negara Arab yang notabene merupakan negara tetangga. Hal ini disebabkan karena kemerdekaan Israel merupakan bencana besar bagi masyarakat Palestina yang terusir dari wilayah teritorial yang sebelumnya diduduki (BBC News Indonesia, 2018). Indonesia dalam hal tersebut turut memberikan kecaman kepada Israel yang telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dengan menindas masyarakat Palestina. Sejak mendapatkan kemerdekaannya masing-masing, Indonesia hingga saat ini pun memutuskan untuk tidak menjalin hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka menunjukkan dukungan penuh yang dimiliki oleh Indonesia untuk memberikan kemerdekaan bagi Palestina (Erdianto, 2017). Namun dari sisi lain, Israel terus menunjukkan usahanya untuk menarik perhatian Indonesia dengan harapan mampu membuka hubungan diplomatik.

Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina terkait perebutan wilayah telah menyita perhatian dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan konflik tersebut telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang sejatinya dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional sesuai dengan yang tercantum dalam Piagam PBB di artikel pertama poin ke-tiga, yakni *promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion* (United Nations, 2020). Sunarko selaku Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri yang saat itu menjabat juga sempat menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Israel kepada Palestina sejatinya merupakan bentuk dari penjajahan, dan tidak sesuai dengan isi dari Pembukaan

UUD 1945 (Erdianto, 2017). Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Indonesia dalam hal ini berkomitmen untuk selalu ikut serta dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, termasuk perihal konflik Israel dengan Palestina (Erdianto, 2017).

Pada tahun 2016, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo secara terang-terangan menolak segala pernyataan terkait adanya kontak hubungan diplomatik rahasia yang dilakukan dengan Israel (BBC News Indonesia, 2016). Bantahan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Retno Marsudi, ketika Tzipi Hotovely selaku Wakil Menteri Luar Negeri Israel mencoba menjelaskan alasan di balik pelarangan kunjungan Retno Marsudi ke Tepi Barat. Pelarangan tersebut disampaikan oleh Hotovely yang memaparkan bahwa pihak Indonesia telah melanggar kesepakatan dengan Israel yang sebelumnya diatur dalam sebuah pertemuan. Pertemuan tersebut diketahui melibatkan pejabat Indonesia dengan Mark Sofer yakni Kepala Divisi Asia Kementerian Luar Negeri Israel di Indonesia (BBC News Indonesia, 2016). Bantahan yang disampaikan oleh Retno Marsudi juga mendapatkan dukungan dari Arrmanatha Nassir selaku Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, kemudian dapat dipahami bahwa Indonesia benar-benar tidak mengakui terdapatnya kontak diplomatik resmi dengan Israel dalam bentuk apapun.

Alasan kuat Indonesia untuk enggan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejatinya dikarenakan keberpihakan Indonesia untuk selalu mendukung Palestina dalam konflik bersama Israel. Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia akan selalu berusaha dalam memperjuangkan hak-hak yang dimiliki masyarakat Palestina untuk merdeka (Saubani, 2018). Sejalan dengan perkataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunarko juga mengatakan bahwa terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel merupakan suatu hal yang tidak akan pernah terjadi sampai Palestina mendapatkan kemerdekaannya (Erdianto, 2017). Keberpihakan Indonesia untuk Palestina juga disampaikan secara terang-terangan oleh pihak Indonesia (Armandhanu & Samosir, 2016). Melalui pidatonya, Joko

Widodo selaku Presiden ketika menghadiri pertemuan organisasi negara-negara Islam (OKI) di tahun 2016, mengatakan:

“Sebagai bagian dari masyarakat internasional Israel harus segera menghentikan aktivitas dan kebijakan ilegalnya di wilayah pendudukan. Indonesia dan dunia Islam siap melakukan langkah konkret untuk terus mendesak Israel mengakhiri penjajahannya atas Palestina dan menghentikan kesewenang-wenangan di Al Quds Al Sharif.”

Mengetahui beberapa kondisi yang menunjukkan keengganan Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel tetap bersikeras menyerukan niatnya untuk terus menjalin hubungan yang ‘sangat baik’ dengan Indonesia. Seruan tersebut disampaikan di Yerusalem dalam *International Conference for Christian Journalists* (Ahren, 2018b). Di dalam acara yang sama, Netanyahu bahkan juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki hubungan kuat dan terbuka dengan Israel. Oleh sebab itu Israel menilai bahwa terbentuknya hubungan diplomatik dengan Indonesia merupakan sebuah tujuan penting yang harus dicapai.

Usaha Israel untuk mendapatkan perhatian dari Indonesia juga dilakukan dalam praktik pengiriman bantuan kemanusiaan yang ditujukan bagi para korban gempa dan tsunami Sulawesi, Indonesia pada September 2018. Gempa bumi dengan kekuatan 7,5 SR dan tsunami yang terjadi telah menewaskan lebih dari 2.000 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tercatat hampir 200.000 korban luka termasuk anak-anak membutuhkan pertolongan yang intensif (Muhaimin, 2018). Israel dalam hal ini diketahui telah mengirimkan beberapa pekerja bantuan terutama bantuan medis dan alat penjernih air untuk memenuhi kebutuhan para korban terhadap air bersih khususnya di Sulawesi melalui IsraAID (Michico, 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa terdapat kegigihan yang nyata dari pihak Israel dalam menarik perhatian Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik di antara keduanya. Namun di sisi lain, Indonesia secara

tegas telah menolak penjalinan hubungan diplomatik dengan Israel sampai Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dilihat bahwa di sini Israel berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan mengingat kedaulatan negara seakan menjadi sebuah pertaruhan untuk menjalin ‘hubungan baik’ dengan Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri akan selalu berada di pihak Palestina. Mengingat kedua negara bersangkutan tidak memberikan *mutual consent* untuk menjalin hubungan diplomatik secara resmi, oleh sebab itu peneliti menganggap penelitian ini menarik dalam rangka memahami potensi yang dimiliki oleh Indonesia sehingga mampu menggerakkan Israel untuk menunjukkan kegigihannya dalam menjalin hubungan diplomatik. Melalui hasil penelitian ini, peneliti juga berharap agar masyarakat luas mampu memahami perilaku suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya, memiliki kesadaran terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi dengan stabilitas internasional dengan memerhatikan motif-motif yang dimiliki oleh berbagai negara, sehingga perdamaian internasional pun dapat selalu terjaga.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak Indonesia dan Israel memperoleh kemerdekaannya masing-masing, kedua negara tersebut tidak pernah menjalin hubungan diplomatik secara resmi hingga saat ini. Indonesia secara terang-terangan telah menolak pembentukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum memperoleh kemerdekaannya. Di sisi lain, latar belakang masalah menunjukkan bahwa Israel menunjukkan kegigihannya untuk menarik perhatian Indonesia dalam rangka membentuk hubungan diplomatik. Berdasarkan kondisi tersebut kemudian pertanyaan penelitian pun muncul yakni, mengapa Israel tetap berupaya untuk menjalin hubungan diplomatik secara resmi dengan Indonesia, sementara Israel sendiri telah menyadari bahwa Indonesia akan tetap berpegang teguh pada penolakan pembentukan hubungan diplomatik tersebut?

1.3 Tinjauan Pustaka

Hubungan antara Israel dengan Indonesia dapat dikatakan tidak berjalan secara harmonis. Selain belum memiliki hubungan diplomatik yang resmi, ketegangan yang dialami oleh kedua negara juga disebabkan oleh posisi Indonesia yang berlawanan dengan Israel di dalam konflik sengketa wilayah Israel-Palestina untuk memperebutkan Yerusalem. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika hubungan yang terjadi antara kedua negara tersebut, peneliti secara spesifik belum menemukan tulisan yang membahas tentang motif di balik kegigihan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Oleh sebab itu peneliti kemudian meninjau beberapa penelitian terdahulu mengenai interaksi Israel dengan Indonesia, serta negara-negara yang memiliki kemiripan dengan Indonesia. Seperti negara-negara di Afrika, Asia, dan juga Turki dalam rangka menentukan pola interaksi Israel, yang mana mampu mencerminkan motifnya sehingga kemudian menjadi bagian dari hipotesis penelitian ini.

Terkait konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina, Muttaqien (2013) berpendapat bahwa keberpihakan Indonesia terhadap Palestina memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterkaitannya dengan aspek kultural yang mencakup faktor agama. Mayoritas masyarakat di Indonesia merupakan pemeluk agama Islam seperti halnya masyarakat di Palestina. Yerusalem atau yang juga dikenal dengan Al-Quds merupakan kota suci bagi umat Islam, Kristen, sekaligus Yahudi. Terdapatnya kesamaan terkait klaim kepemilikan kota suci tersebut kemudian mendorong konflik sengketa wilayah pun terjadi antara Israel dengan Palestina. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muttaqien (2013), Wibowo (2017) juga menyebutkan bahwa dukungan yang diberikan oleh Indonesia untuk Palestina pada dasarnya lahir dari sebuah kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia sehingga hubungan antarsesama negara pemeluk Islam pun harus dijaga dan dipertahankan.

Barton dan Rubenstein (2015) menyebutkan bahwa pada dasarnya sentimen masyarakat Indonesia terhadap Israel sendiri telah ada sejak Pemerintahan Soekarno yang cenderung lebih memilih untuk menjalin kerja sama dengan

Bangsa Arab, negara-negara dari Gerakan Non-Blok (GNB), serta negara-negara sesama bekas jajahan Eropa. Namun ketika memasuki masa pemerintahan Soeharto, Indonesia seakan mulai membuka pintu hubungan dengan Israel melalui perundingan kerja sama di bidang perdagangan. Hal ini ditandai dengan kunjungan secara diam-diam yang dilakukan oleh Yitzhak Rabin selaku Perdana Menteri Israel di kediaman Soeharto pada tahun 1993 (Barton & Rubenstein, 2015). Setahun setelah kunjungan Rabin ke Indonesia, Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan ke Israel dalam rangka memenuhi undangan Shimon Peres menyaksikan upacara perjanjian damai antara Israel dengan Yordania. Selama menjabat menjadi Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid juga sempat mempromosikan penjalinan hubungan baik dengan Israel melalui praktik kerja sama di dalam bidang ekonomi (Barton & Rubenstein, 2015). Lebih lanjut, belum ada penelitian yang menuliskan relasi Indonesia dengan Israel ketika berada di bawah pemerintahan B. J. Habibie. Ketika memasuki masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, realisasi hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Israel dilakukan melalui penanaman investasi dan praktik perdagangan (Darist, 2015). Memasuki masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia bersikap sangat tegas dengan posisinya untuk berpihak pada Palestina yang berlawanan dengan posisi Israel. Saragih (2018) menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat turut berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa antara Israel dengan Palestina dengan dasar keinginan mewujudkan perdamaian dunia. Sejalan dengan pernyataan tersebut, OKI (Organisasi Kerjasama Islam) kemudian disebut-sebut sebagai organisasi yang diunggulkan Indonesia untuk menyalurkan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dengan mengumpulkan dukungan terutama dari negara-negara di Timur Tengah (Prasetya & Srifauzi, 2018).

Selain itu peneliti juga meninjau beberapa pustaka mengenai usaha Israel mendekati diri dengan negara-negara yang ada di Asia dan Afrika dalam rangka mengetahui motif sebenarnya yang dimiliki oleh Israel. Terlebih lagi mengingat Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Asia, dan banyak pula masyarakat di Afrika yang memeluk agama Islam, serupa dengan Indonesia.

Di sekitar tahun 1960an, Israel diketahui mendekati diri dengan India dalam rangka mendapatkan pengakuan diplomatik. Menurut pandangan Israel, India merupakan negara yang mampu menjadi pen jembatan mengingat para pemimpin di India itu sendiri berlatarbelakang non-muslim namun mendapatkan rasa hormat dari negara-negara Arab. Namun hal ini ternyata tidak cukup untuk meyakinkan Pakistan termasuk Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel (Brecher, 1961). Lebih lanjut, usaha Israel untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di Afrika pada dasarnya juga telah dilakukan di sekitar tahun yang sama yakni 1960an, melalui beberapa cara seperti pemberian bantuan teknis dalam bidang agrikultur, kerja sama perdagangan, termasuk pemberian bantuan dalam bidang militer. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Israel tersebut bertujuan untuk memberikan pengaruh politik kepada negara-negara di Afrika sekaligus mengakhiri masa isolasi Israel di kawasan Timur Tengah terutama ketika berlawanan dengan negara-negara Arab (Jacob, 1971). Ghana dan Nigeria merupakan dua negara yang berperan paling penting bagi Israel. Hal ini dikarenakan Israel melihat perkembangan Ghanaian Trade Union Movement sebagai sebuah peluang dalam rangka memperluas jaringannya di Afrika Barat. Di saat yang bersamaan, Israel juga memiliki kepentingan ekonomi dengan Nigeria sebagai negara tujuan ekspor. Selain itu melalui kerja sama perekonomian yang terjalin, Israel sekaligus berharap mampu mendapatkan dukungan dari Nigeria ketika berada dalam forum diskusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Gitelson, 1980). Secara spesifik, Wezeman (2011) memaparkan bahwa perluasan kerja sama ekonomi di negara-negara Afrika yang dilakukan oleh Israel pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan pasar senjata militer serta membendung pengaruh Iran. Di tahun 2016, Pemerintah Israel semakin menunjukkan kegigihannya dalam rangka mempererat hubungan dengan negara-negara di Afrika khususnya yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Motif-motif yang dimiliki oleh Israel terhadap kawasan Afrika (dimana terdapat beberapa negara yang penduduknya berstatus Muslim) meliputi: (1) pentingnya memiliki pengakuan diplomatik; (2) memperluas jaringan kerja sama

perdagangan (terutama senjata militer dan teknologi); dan (3) membentuk aliansi yang strategis (Gruzd et al., 2018).

Bergeser dari penelitian terdahulu mengenai usaha interaksi Israel di kawasan Afrika, selanjutnya peneliti akan meninjau penelitian terdahulu mengenai dinamika hubungan Israel dengan Turki. Hal ini mengingat Turki sebagai negara yang berpihak pada Palestina, seperti halnya Indonesia, terhadap konflik melawan Israel. Hubungan Israel dengan Turki dapat dikatakan bersifat fluktuatif. Krisis hubungan di tahun 2010 terjadi karena insiden penembakan kapal Mavi Marmara milik Turki oleh Israel. Sejak saat itu Turki kemudian mencabut hubungan diplomatiknya dengan Israel, membekukan semua kerja sama dalam bidang militer, dan mencoba untuk memblokir partisipasi Israel di beberapa institusi multinasional seperti NATO-Mediterranean Dialogue, US Turkey Led Global Counter-Terrorism Forum (GCTF), termasuk menantang para tentara Israel khususnya yang berada di jalur Gaza (Arbell, 2014). Namun di tengah-tengah krisis politik yang terjadi, status saling kebergantungan ekonomi di kegiatan perdagangan antara Israel dengan Turki justru semakin meningkat hingga tahun 2014, meski arus modal berupa *foreign direct investment* (FDI) mengalami penurunan (Eroglu et al., 2016). Membangun relasi yang positif bersama Turki merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh Israel. Pernyataan tersebut didukung oleh pemaparan milik Efron (2018) yang menyebutkan bahwa Israel memiliki kepentingan ekonomi dengan Turki dalam bidang perdagangan, pariwisata, dan energi. Bagi Israel, Turki merupakan pasar yang strategis dengan sekitar 75 juta konsumen di dalamnya. Oleh sebab itu Israel kemudian mencoba untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Turki berupa permintaan maaf Israel terkait insiden penembakan kapal Mavi Marmara, pemberian kompensasi untuk korban, dan pencabutan blokade tentara Israel di Jalur Gaza. Selain itu Israel juga memiliki kepentingan dalam menjalin kerja sama penerbangan dengan Turki yang menjadi aspek signifikan setelah normalisasi hubungan di antara keduanya terlaksana di sekitar tahun 2017. Di dalam tulisan yang sama, Efron (2018) juga menyebutkan bahwa pada akhirnya, isu Palestina menjadi kunci bagaimana hubungan antara Israel dengan Turki dapat terjalin secara harmonis.

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka di atas, maka dapat dipahami bahwa hubungan Indonesia dengan Israel memiliki corak tertentu yang bergantung pada peran pemimpin dari Indonesia, dimana pihak Israel terlihat selalu ingin mendekatkan diri dengan Indonesia. Hal tersebut juga berlaku pada Israel dengan negara-negara di Afrika dan Asia seperti Ghana, Nigeria, India, Pakistan, termasuk Turki. Peneliti secara spesifik belum menemukan tulisan yang membahas tentang motif di balik kegigihan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Mengingat Indonesia sendiri telah menolak secara terang-terangan niat Israel untuk menjalin hubungan diplomatik bersama. Oleh sebab itu, peneliti menganggap penelitian ini menjadi penting untuk dilanjutkan dalam rangka menambah wawasan bagi khususnya para akademisi hubungan internasional.

1.4 Kerangka Berpikir

1.4.1 Pentingnya Pengakuan Internasional bagi Negara Berdaulat

Negara merupakan aktor rasional di dalam hubungan internasional. Hal ini didukung dengan fakta bahwa setiap negara yang telah merdeka memiliki hak untuk mengatur segala permasalahan yang ada di dalam negara bersangkutan dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya. Unsur-unsur negara sendiri meliputi terdapatnya wilayah teritorial, penduduk di dalamnya, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan yang diperoleh dari negara lain. Weaton (dalam Alexandrowicz, 2017) mengemukakan teori konstitutif yang memaparkan bahwa sebuah negara belum benar-benar merdeka ketika belum mendapatkan pengakuan dari negara lain. Hal ini dikarenakan untuk mencapai kedaulatan secara menyeluruh, negara juga perlu menekankan pengaruh eksternal yang dimilikinya, di samping penguasaan atas beberapa faktor internal yang sudah terkendali. Pengaruh eksternal tersebut berupa pengakuan yang diberikan oleh negara lain bahwa negara bersangkutan merupakan negara yang merdeka dan secara resmi berdaulat. Oleh sebab itu pandangan internasional terhadap sebuah negara kemudian menjadi penting sebagai penentu, apakah negara bersangkutan layak

untuk mendapatkan sebuah bentuk pengakuan dari negara lain yang didasarkan oleh beberapa faktor. Selain itu teori konstitutif yang menekankan pentingnya pengaruh eksternal juga menyebutkan bahwa kedaulatan suatu negara dapat dicapai secara menyeluruh ketika negara tersebut diakui keberadaannya dalam sistem internasional dan mendapatkan perlakuan yang setara dengan negara berdaulat lainnya (Alexandrowicz, 2017). Sejalan dengan Hersch Lauterpacht (1944) yang menjelaskan bahwa setiap negara pasti memiliki hasrat untuk diakui eksistensinya di ranah perpolitikan internasional. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah proses pencapaian kepentingan nasional negara bersangkutan. Perlu juga diketahui bahwa dengan mendapatkan pengakuan internasional, negara akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti kepemilikan atas rasa puas yang didapatkan melalui pengakuan dari negara-negara lain, bahwa negara tersebut merupakan negara yang berhak mengatur pemerintahannya secara mandiri dan kedaulatannya harus dihormati. Keuntungan lain berupa keuntungan material seperti kepemilikan atas otoritas untuk mencetak uang sendiri, mendapatkan dukungan baik secara teknis maupun finansial dari organisasi-organisasi internasional, mampu memberdayakan dan melindungi sumber daya alam yang dimiliki, dan mendapatkan perlindungan resmi agar terhindar dari segala bentuk penyerangan oleh aktor asing (Agné, 2013).

Selain perlu mendapatkan pengakuan internasional, sebuah negara juga membutuhkan *self-image* nasional yang bersifat positif. Hal ini dikarenakan *self-image* nasional memengaruhi bagaimana sebuah negara berinteraksi dengan negara-negara lain, yang nantinya juga membentuk sebuah pandangan internasional terhadap negara bersangkutan. Menjaga *self-image* nasional yang positif menjadi penting karena berkaitan dengan usaha sebuah negara dalam rangka memperoleh kepentingan nasional. Lebih lanjut, dipaparkan oleh peneliti pada bagian tulisan selanjutnya.

1.4.2 *Self-Image* Nasional

Selain mempertimbangkan pandangan internasional yang dimiliki oleh sebuah negara di dalam melakukan interaksi dengan negara lain, negara juga memiliki stereotip mengenai dirinya sendiri. Stereotip muncul dari dalam negara bersangkutan yang juga menjadi bagian dari budaya bersama, dan menjadi suatu hal yang dilestarikan. Stereotip-stereotip tersebut ketika dikumpulkan menjadi suatu kesatuan warga negara dalam memandang negaranya sendiri, kemudian dikenal sebagai *self-image* nasional (Kaplowitz, 1990 dalam Hirshberg, 1993). *Self-image* nasional pada dasarnya terbentuk dari kombinasi rangkaian proses politik, sosiokultural, dan psikologis yang melibatkan peran dari masyarakat serta pemerintah negara bersangkutan. Mempertahankan *self-image* nasional yang bersifat positif, menjadi krusial dalam rangka mendapatkan persetujuan publik, memberikan dukungan pada pemerintah negara, serta mampu menjalankan peran-peran negara secara lancar dalam tatanan internasional. Dikarenakan peran publik menjadi penting dalam pembentukan *self-image* nasional, maka bentuk pemerintahan politik yang bersifat demokratis pun turut menjadi signifikan dalam usaha mempertahankan *self-image* nasional yang bersifat positif serta konsisten (Hirshberg, 1993).

Memiliki *self-image* nasional yang bersifat positif menjadi bermanfaat ketika sebuah negara menghendaki adanya bentuk kerja sama dengan negara lain. Bentuk kerja sama tersebut bertujuan untuk memperoleh kepentingan nasional negara bersangkutan sekaligus mewujudkan adanya perdamaian. Lebih lanjut, relasi antara kerja sama serta terwujudnya perdamaian melalui praktik diplomasi dipaparkan oleh peneliti di bagian tulisan selanjutnya.

1.4.3 Relasi antara Kerja Sama Perekonomian dan Terwujudnya Nilai Perdamaian dari Perspektif Liberalisme

Memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, interdependensi perekonomian negara-negara di seluruh penjuru dunia cenderung semakin meningkat. Hal tersebut ditunjang oleh terdapatnya perkembangan teknologi serta berbagai bentuk kerja sama ekonomi yang terjalin antarnegara, yang mana kedua hal tersebut

menjadi komponen utama di dalam perkembangan ekonomi sebuah negara (Caraiani & Georgescu, 2013 dalam Andrusac & Hertug, 2015). Kerja sama ekonomi yang terjalin antarnegara juga dianggap sebagai sebuah metode mendasar bagi negara di dalam mempertahankan eksistensinya dalam lingkup internasional yang bersifat saling menguntungkan (Jackson & Sorensen, 1999). Baik itu bertujuan untuk mendapatkan perlindungan melalui lingkungan yang ramah, akses terhadap berbagai sumber daya alam, maupun memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di dalamnya.

Kerja sama perekonomian diidentifikasi sebagai bagian dari kerja sama internasional yang bertujuan untuk memberikan fasilitas terkait aktivitas komersial serta integrasi keuangan di dalam lingkup internasional. Melalui beberapa penerapan kerja sama yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan keuntungan perekonomian bagi negara-negara yang terlibat (Andrusac & Hertug, 2015). Tidak hanya terbatas pada aktivitas perdagangan, namun kerja sama ekonomi yang terjalin antarnegara sejatinya mencakup aspek yang lebih luas, mulai dari kerja sama industri, saling bertukar informasi sehingga mampu meningkatkan inovasi serta penelitian, bahkan membentuk badan khusus yang menangani perkembangan perekonomian negara-negara bersangkutan (Barston, 2014 dalam Andrusac & Hertug, 2015).

Di dalam Hubungan Internasional sendiri, menurut Siitonen (1990, dalam Andrusac & Hertug, 2015) kerja sama perekonomian antarnegara dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yakni realisme dan liberalisme. Mengacu pada topik penelitian ini yang membahas tentang relasi antara Indonesia dengan Israel, peneliti berfokus pada pendekatan liberalisme yang dianggap lebih relevan apabila dikaitkan dengan kondisi internasional sekarang. Berdasarkan pendekatan liberal, negara sebagai entitas berdaulat memiliki peran dalam melindungi pasar dan kebebasan ekonomi melalui penyediaan layanan yang tidak tersedia di sektor swasta. Kondisi perekonomian internasional tidak memiliki entitas resmi yang mampu melindungi kondisi perekonomian masing-masing negara secara pasti. Hal inilah yang kemudian mendorong negara-negara untuk menjalin kerja sama

dan menjadi alasan bagaimana institusi-institusi perekonomian internasional dapat lahir dan berkembang hingga saat ini (1990, dalam Andrusiac & Hertug, 2015).

Selain itu, Smith (2004 dalam Andrusiac & Hertug, 2015) menyebutkan bahwa kerja sama perekonomian mampu menjadi fasilitas dalam mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan stabil yang secara tidak langsung juga mempromosikan rekonsiliasi politik antarnegara bersangkutan. Di dalam implementasinya, kerja sama perekonomian antarnegara dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral dalam rangka mencapai tujuan yang diwujudkan melalui praktik diplomasi (Panzari, 2002). Melalui pembentukan kerangka yang terorganisir, mencakup baik aspek makroekonomi maupun mikroekonomi dengan regulasi yang jelas (Andrusiac & Hertug, 2015). António Guterres (dalam United Nations, 2018) memaparkan bahwa di era globalisasi seperti sekarang, melalui diplomasi dalam rangka menjalin kerja sama yang dilakukan antarnegara dapat menciptakan perdamaian dunia, dikarenakan masyarakat yang telah mendapatkan kesejahteraannya dan saling menghargai eksistensi masing-masing negara di ranah internasional.

1.5 Hipotesis

Israel tetap berupaya untuk menjalin hubungan diplomatik secara resmi dengan Indonesia karena Israel memiliki beberapa alasan. Alasan pertama dan juga yang menjadi poin paling utama dalam pembahasan skripsi ini ialah menyangkut arti penting pengakuan Indonesia terhadap eksistensi Israel sebagai negara berdaulat. Alasan selanjutnya ialah memperbaiki pandangan internasional terhadap Israel, bahwa sejatinya Israel merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai perdamaian melalui usaha memperbaiki *self-image* nasional dengan Indonesia sebagai sosok negara panutan. Alasan terakhir menyangkut potensi kekayaan alam dan luasnya pasar konsumen yang dimiliki oleh Indonesia, yang akan memberikan keuntungan bagi Israel apabila kedua negara menjalin hubungan diplomatik.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Pengakuan Internasional

Unsur terkait pengakuan internasional pada dasarnya menjadi penting ketika sebuah negara menerapkan teori konstitutif dalam rangka mendeklarasikan kemerdekaannya. Signifikansi dari pengakuan internasional dapat ditunjukkan ketika sebuah pemerintahan negara yang berdaulat mengumumkan atau mengakui terdapatnya entitas politik lain yang juga merupakan negara berdaulat (Agné, 2013). Ketika sebuah negara telah mendapatkan pengakuan tersebut, maka pemegang kekuasaan dan masyarakat yang ada di dalam negara bersangkutan secara otomatis akan mendapatkan perlakuan yang setara dengan negara-negara berdaulat lainnya di ranah perpolitikan internasional. Berdasarkan hukum internasional, belum ada sebuah entitas resmi yang mampu memberikan pernyataan terkait pengakuan internasional terhadap suatu negara tertentu. Hal ini dikarenakan pengakuan internasional memiliki kaitan yang erat dengan progresivitas hubungan antarnegara di dalam konstelasi perpolitikan internasional. Oleh sebab itu pengakuan internasional dapat digunakan sebagai sebuah penanda solidaritas negara-negara dalam menjunjung tinggi suatu nilai, melemahkan legitimasi sebuah negara ketika terdapat gerakan pemisahan diri, maupun memperluas kekuatan internasional melalui pengakuan yang didapatkan (Agné, 2013). Bartelson (2008) menyebutkan bahwa melalui *mutual recognition* antarnegara, maka situasi damai akan lebih mudah diciptakan di dalam hubungan internasional.

1.6.1.2 Pandangan Internasional (*International Image*)

Konsep mengenai pandangan internasional (*international image*) pada dasarnya berkaitan erat dengan konteks yang ada di dalam kajian hubungan internasional. Di dalam hubungan internasional, pandangan internasional memegang peranan penting untuk memengaruhi ekspektasi suatu negara terhadap negara lain. Ekspektasi yang dimaksud ialah sebuah gambaran tentang bagaimana suatu negara memahami maksud dari tindakan yang dilakukan oleh negara lain (Castano

et al., 2003). Gambaran yang melekat pada sebuah negara merupakan identitas yang dimiliki negara tersebut, dan diyakini oleh negara-negara lain yang dalam waktu bersamaan juga berada dalam sistem internasional. Hermann, Voss, Schooler, dan Ciarrochi (dalam Castano et al., 2003) memaparkan bahwa hasil gambaran dari negara lain terhadap suatu negara merupakan sebuah kumpulan sifat yang tersusun dengan cara yang bermakna, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap reaksi dari negara-negara yang memandangnya. Gambaran sebuah negara berkaitan erat dengan faktor bagaimana pandangan yang dimiliki oleh negara lain, seperti asumsi terkait kemampuan relatif negara bersangkutan, asumsi tentang terdapatnya ancaman maupun peluang yang direpresentasikan, dan bagaimana unsur budaya yang melekat dengan negara tersebut. Sebuah negara memiliki peranan yang penting dalam menonjolkan gambaran mengenai dirinya di dalam perpolitikan internasional. Hal ini dikarenakan sebuah tindakan yang diambil oleh negara akan menentukan apakah negara lain menganggap negara tersebut sebagai musuh atau sekutu (Castano et al., 2003).

1.6.1.3 Hubungan Diplomatik Antarneegara

Di dalam konstelasi perpolitikan internasional, hubungan politik negara-negara yang ada di dalamnya pada umumnya ditandai dengan terjalinnya hubungan diplomatik. Ketika negara-negara telah menjalin hubungan diplomatik, maka negara-negara bersangkutan telah saling mengakui terdapatnya relasi sehingga memungkinkan terjadinya bentuk kerja sama dalam beberapa aspek seperti perekonomian, pariwisata, budaya, dan pertukaran informasi terkait kemajuan teknologi. Di dalam implementasinya, hubungan diplomatik antarneegara ditandai dengan terdapatnya perwakilan diplomatik. Menurut Eric Neumayer (2008), terdapatnya perwakilan diplomatik berfungsi untuk mengaspirasikan kepentingan politik dan ekonomi suatu negara kemudian melakukan negosiasi bersama negara lain untuk membentuk jalinan hubungan kerja sama. Negosiasi yang dilakukan berisi tentang susunan koordinasi untuk menyelesaikan isu tertentu dan mengumpulkan informasi yang sejatinya bersifat spesifik dan tidak dipublikasikan secara umum (Neumayer, 2008). Hubungan diplomatik yang demikian diharapkan

mampu memberikan keuntungan di beberapa aspek kehidupan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara.

1.6.2 Tipe Penelitian

Terkait isu pengimplementasian berbagai usaha Israel untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, peneliti melakukan penelitian yang berbasis eksplanatif. Peneliti juga berfokus pada pengamatan terhadap beberapa alasan Israel dibalik kegigihannya dalam menarik perhatian Indonesia, sesuai dengan hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya. Eksplanasi yang dipaparkan pun berlandaskan pada teori yang telah ditentukan peneliti di dalam kerangka berpikir penelitian ini.

1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Berkesesuaian dengan latar belakang, peneliti menentukan ruang lingkup penelitian yang berfokus pada interaksi antara Israel dengan Indonesia yang ditunjukkan melalui peran dari para aktor politik sebagai representasi resmi masing-masing negara. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap perkembangan interaksi para aktor politik dari kedua negara tersebut dalam skala internasional, dalam rangka membuktikan teori-teori yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk periode waktu pengamatan pun dimulai sejak Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, ketika Israel menyadari potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari data primer maupun data sekunder. Studi kepustakaan yang dimaksud ialah dengan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen berupa tulisan seperti buku, jurnal, dan literatur *online* yang telah dipublikasikan sebelumnya, serta menggunakan media internet sebagai sarana mengakses *website* resmi milik negara-negara bersangkutan. Dikarenakan luasnya jangkauan waktu penelitian,

maka pemilihan data berfokus pada data yang mampu memperkuat argumen peneliti, serta berkesesuaian dengan teori yang telah ditentukan.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian, peneliti kemudian menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian kali ini menghasilkan tulisan berupa kalimat eksplanatif, yang merupakan hasil dari interpretasi peneliti tentang korelasi antara sumber data dengan teori.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini nantinya tersusun atas lima bab yang berisi satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan ditutup dengan satu bab kesimpulan. Di dalam Bab I peneliti menyajikan beberapa komponen tahap awal penelitian yakni latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, serta metode dan metodologi penelitian. Ketiga bab selanjutnya berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan dengan berlandaskan pada beberapa hipotesis yang telah disampaikan. Peneliti melakukan tinjauan terkait dinamika jejak kontak Israel dengan Indonesia pada Bab II, kemudian membahas tentang pandangan Israel terkait pentingnya peran Indonesia untuk mengakui eksistensi Israel sebagai negara yang berdaulat di perpolitikan internasional pada Bab III, dan pembahasan mengenai posisi strategis Indonesia dalam bidang ekonomi internasional Bab IV. Di dalam bab terakhir yakni Bab V, peneliti kemudian menyusun sebuah kesimpulan sehingga keterkaitan antara hipotesis dengan hasil penelitian dapat dijelaskan secara komprehensif serta saran yang mampu memberikan kontribusi sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.